

CASCADING DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	71.15
2	Terbangunnya permukiman transmigrasi dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yg layak	Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan	60%

KEPALA DINAS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana gedung kantor	90%
		Persentase tingkat kehadiran dan disiplin pegawai	90%
		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang akurat dan akuntabel	97%
		Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	BB
		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%
2	Meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Nilai Indikator Perencanaan Tenaga Kerja	9,28

SEKRETARIS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran dalam Acara yang diundang	97%
2	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran Disnakertrans Prov. Sulut	95%
3	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%
4	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah aset yang tercatat	100%
5	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata- rata Presentase Kinerja ASN Disnakertrans Prov. Sulut	97%
6	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah di Disnakertrans Prov. Sulut dalam kondisi Baik	98%
7	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan	100%
8	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%
9	Terlaksananya Penyusunan Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi	8 dokumen

Kasubag Umum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	250 perusahaan
		Persentase LPK yang terakreditasi	40%
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten kota dalam satu daerah provinsi	62%
3	Meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Indeks IPK Pelatihan dan Kompetensi Kerja	12,25

KABID LATPENTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	10 LPK
2	Meningkatnya pelatihan produktivitas tenaga kerja	Jumlah PMI Purna yang dilatih kewirausahaan	50 orang
3	Meningkatnya Indikator Indeks Pelatihan dan Kompetensi Kerja dalam Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Indeks Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja	4,51
		Indeks Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja	6,01
		Indeksi Tingkat Lembaga Latihan yang Terakreditasi	1,75

Kasie Pelatihan & Produktivitas Kerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan melalui Pameran Bursa Kerja	Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam suatu wilayah provinsi	1050 lowongan
		Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan dalam event Pameran Bursa Kerja	650 orang

Kasie Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri & Penggunaan Tenaga Kerja Asing

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Perusahaan yang menerapkan PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Kepesertaan Jamsostek serta Penyelesaian Perselisihan HI yang diselesaikan	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah dan terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan	60%
		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama oleh mediator hubungan industrial	80%
2	Meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Indeks Hubungan Industrial	4,26
		Indeks Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	7,36
		Indeks Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10,00

KABID HI DAN JAMSOS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kabupaten/Kota yang menerapkan UMK sesuai peraturan perundangan	Jumlah Kabupten/Kota yang menetapkan UMK sesuai dengan peraturan perundangan	1 Kab/Kota
2	Meningkatnya perusahaan yang menerapkan Struktur Skala Upah	Persentase Perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	25%
3	Meningkatnya Perusahaan yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang telah terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan	85%
4	Menurunnya Perselisihan Hubungan Industrial	Nilai Proporsi Upah Rata-Rata Per jam terhadap UMP per Jam	8,10
5	Meningkatnya Nilai Indikator Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	- Nilai Tingkat Perusahaan Yang menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	4,00
		- NilaiTingkat Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Aktif	6,00

Kasie Pengupahan dan Jamsos

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Rekapitulasi Tahunan Jumlah Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan	14.000 orang
2	Meningkatnya perusahaan yang memiliki PP/PKB	Persentase Perusahaan yang memiliki PP/PKB	60%
3	Meningkatnya perusahaan yang memahami dan memiliki LKS Bipartit	Persentase Perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit	10%
4	Meningkatnya perusahaan yang memahami dan memiliki LKS Bipartit	- Nilai Tingkat PP yang Disahkan	0,18
		- Nilai Tingkat PKB yang di Daftarkan	0,15
		- Nilai Tingkat LKS Bipartit di Perusahaan	0,16

Kepala Seksi Persyaratan Kerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	90%
		Persentase Pelimpahan Kasus Ketenagakerjaan yang diselesaikan tidak sampai tahap penyidikan	100%
2	Meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Indeks IPK Kondisi Lingkungan Kerja	8,73

KABID PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kepatuhan Badan Usaha/Perusahaan terhadap Norma Kerja, Jamsos, Perempuan dan Anak	Jumlah Perusahaan yang mendaftar Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online;	3450 perusahaan
		Jumlah Perusahaan yang menerapkan norma kebebasan berserikat	3450 perusahaan
		Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Waktu Kerja dan Waktu Istirahat (WKWI)	3450 perusahaan
		Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Pengupahan	3450 perusahaan
		Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja Perempuan	3450 perusahaan
2	Meningkatnya Nilai Indikator Kondisi Lingkungan Kerja Dalam Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Indeks Tingkat Kepatuhan Wajib Laporkan Ketenagakerjaan dalam Perusahaan	1,85

Kasie Pengawasan
Norma Kerja, Jamsos,
Perempuan & Anak

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kepatuhan Badan Usaha/Perusahaan terhadap Norma K3	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	3450 perusahaan
2	Meningkatnya Nilai Indikator Kondisi Lingkungan Kerja dalam Indeks Pembangunan	Indeks Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan	4,01
		Indeks Tingkat Kecelakaan Kerja	2,89

Kasie Pengawasan
Norma Keselamatan
dan Kesehatan Kerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya lokasi permukiman transmigrasi yang layak huni, layak berkembang dan layak lingkungan	Persentase kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	60%
		Persentase satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	80%
		Rekapitulasi Sertifikat Tanah Transmigrasi yang diterbitkan	834 Sertifikat

KABID
KETRANSMIGRASIAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas lembaga pelatihan, Kompetensi Tenaga Kerja, Mutu Manajemen dan Pelayanan Administasi serta Institusi Lembaga	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi BNSP	75%
		Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan lembaga	90%
		Persentase BMD dan BMN yang layak fungsi	80%
		Persentase penyusunan dokumen laporan-laporan tepat waktu	100%

Kepala UPTD Balai
Pelatihan Tenaga Kerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan terhadap kebutuhan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan barang dan jasa	Penyerapan Anggaran	95%
		Persentase aset yang tercatat	100%
		Presentase kehadiran dalam acara yang diundang	97%

Kasubag Tata Usaha

		Rata-rata Persentase Kinerja ASN di UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja	97%
2	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah di UPTD dalam kondisi Baik	98%
3	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan	100%
4	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun akuntabel dan tepat waktu	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kompetensi calon tenaga kerja	Persentase Penyerapan Lulusan Pelatihan	65%
2	Mengembangkan Pengkajian Pelatihan Penerapan dan Bimbingan kerja	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pelatihan Penerapan dan Bimbingan kerja	5 Kab/Kota

Kasie Pelatihan Tenaga Kerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Melaksanakan Akreditasi UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja Kelas A	Jumlah Program Pelatihan yang diakreditasi	2 Program
2	Melaksanakan Sertifikasi Instruktur	Tersertifikasinya Instruktur	1 Orang
3	Mengembangkan Kerjasama Pelatihan Keterampilan Bagi Calon Tenaga Kerja	Jumlah Kerjasama/MOU dengan Stakeholders	6 MOU

Kasie Pengembangan Mutu dan Sertifikasi Pelatihan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Keselamatan Kerja dan Hiperkes diperusahaan dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta mutu pelayanan dalam hal tindak lanjut pengaduan kasus tenaga kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan Bidang Ketenagakerjaan	90%
		Persentase pengaduan kasus tenaga kerja yang diselesaikan	95%
		Persentase BMD dan BMN yang layak fungsi	80%
		Persentase penyusunan dokumen laporan-laporan tepat waktu	100%
		Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan UPTD	90%

Kepala UPTD Balai Pengawasan Tenaga Kerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan terhadap kebutuhan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan barang dan jasa	Penyerapan Anggaran	95%
		Persentase aset yang tercatat	100%
		Presentase kehadiran dalam acara yang diundang	97%
		Rata-rata Persentase Kinerja ASN di UPTD Balai Pengawasan Tenaga Kerja	97%
2	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah di UPTD dalam kondisi Baik	98%

Kasubag Tata Usaha

3	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan	100%
4	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun akuntabel dan tepat waktu	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Kasus pengaduan tenaga kerja	Persentase Pelaporan Kasus Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti	100%
		Jumlah Kasus Ketenagakerjaan yang diselesaikan	50 kasus

Kasie Pemeriksaan Pengaduan & Pelaporan Tenaga Kerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terciptanya kondisi lingkungan kerja yang higienis, aman dan nyaman agar tenaga kerja bekerja di perusahaan selamat dan produktif	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pelayanan Pengujian Lingkungan Kerja	250 perusahaan
2	Meningkatnya derajat kesehatan tenaga kerja di perusahaan	Jumlah tenaga kerja di perusahaan yang diperiksa derajat kesehatannya	700 orang

Kepala Seksi Hiperkes